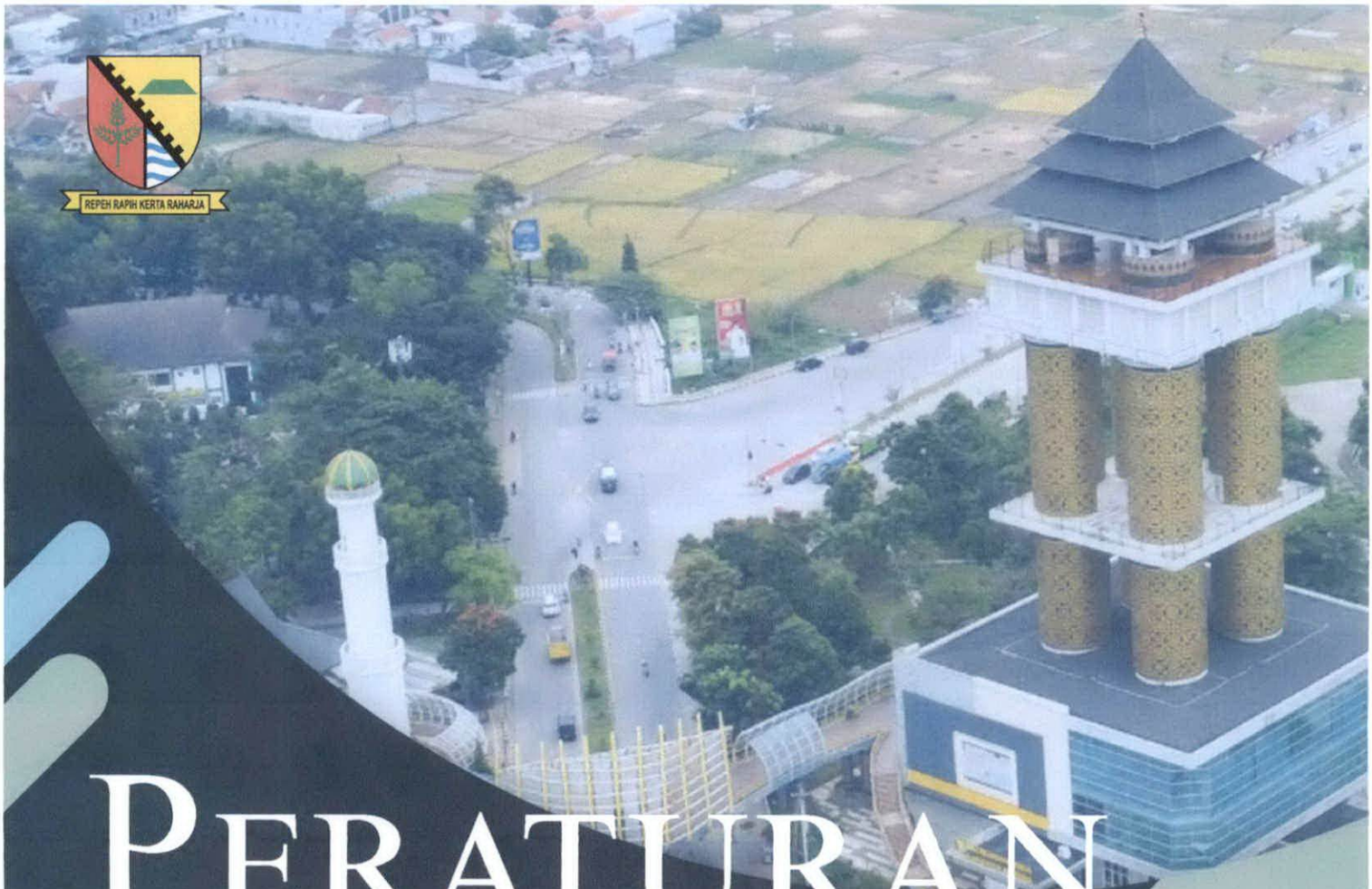


PERATURAN BUPATI

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS KETENAGAKERJAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RENJA PD

Pasal 2

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
e. Penutup; dan
f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan digunakan PD untuk melaksanakan Rencana Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan PD;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD;
   c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
   d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD; dan

d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.

(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

(1) Renja PD dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
   c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran PD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra PD Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 104

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KETENAGAKERJAAN
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax (022) 5893002Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Email : disnaker@bandungkab.go.id
Website : www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 800/029/Sekre
LAMPIRAN : 2 (DUA)

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DINAS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung.

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92).
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025;
13. Keputusan Bupati Bandung nomor 008.1.1/KEP.131-BAPPERIDA/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 12 Maret 2024

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. RUKMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650520 199102 1 002

LAMPIRAN I
NOMOR : 800/029/Sekre
TANGGAL : 12 Maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung
Ketua	:	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung
Sekretaris	:	Fungsional Perencana Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bandung
Anggota	:	1. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja; 2. Kepala Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan IPK; 3. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas; 4. Kepala Bidang Hubungan Industrial 5. Kepala UPTD; 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 7. Kepala Sub Bagian Keuangan

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. RUKMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650520 199102 1 002

LAMPIRAN II
NOMOR : 800/029/Sekre
TANGGAL : 12 Maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG

TUGAS POKOK TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG

I. PENANGGUNG JAWAB
Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Penyusunan Rencana Kerja .

II. KETUA
1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Penyusunan Rencana Kerja .
2. Mengendalikan seluruh kegiatan Penyusunan Rencana Kerja .
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan.

III. SEKRETARIS
1. Membantu ketua mengkoordinasikan seluruh kegiatan Penyusunan Rencana Kerja .
2. Membantu ketua mengendalikan seluruh kegiatan Penyusunan Rencana Kerja .
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja kepada ketua.

V. ANGGOTA
1. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam Penyusunan Rencana Kerja .
2. Memberikan arahan teknis dalam penanganan dan pengendalian dalam Penyusunan Rencana Kerja .

VI. KESEKRETARIATAN
1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan pelaksanaan tugas.
2. Memberikan pelayanan teknis administrasi.
3. Menyelenggarakan rapat-rapat pelaksanaan kebijkan berdasarkan petunjuk Sekretaris.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. RUKMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650520 199102 1 002

Form E.70

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA DISNAKER

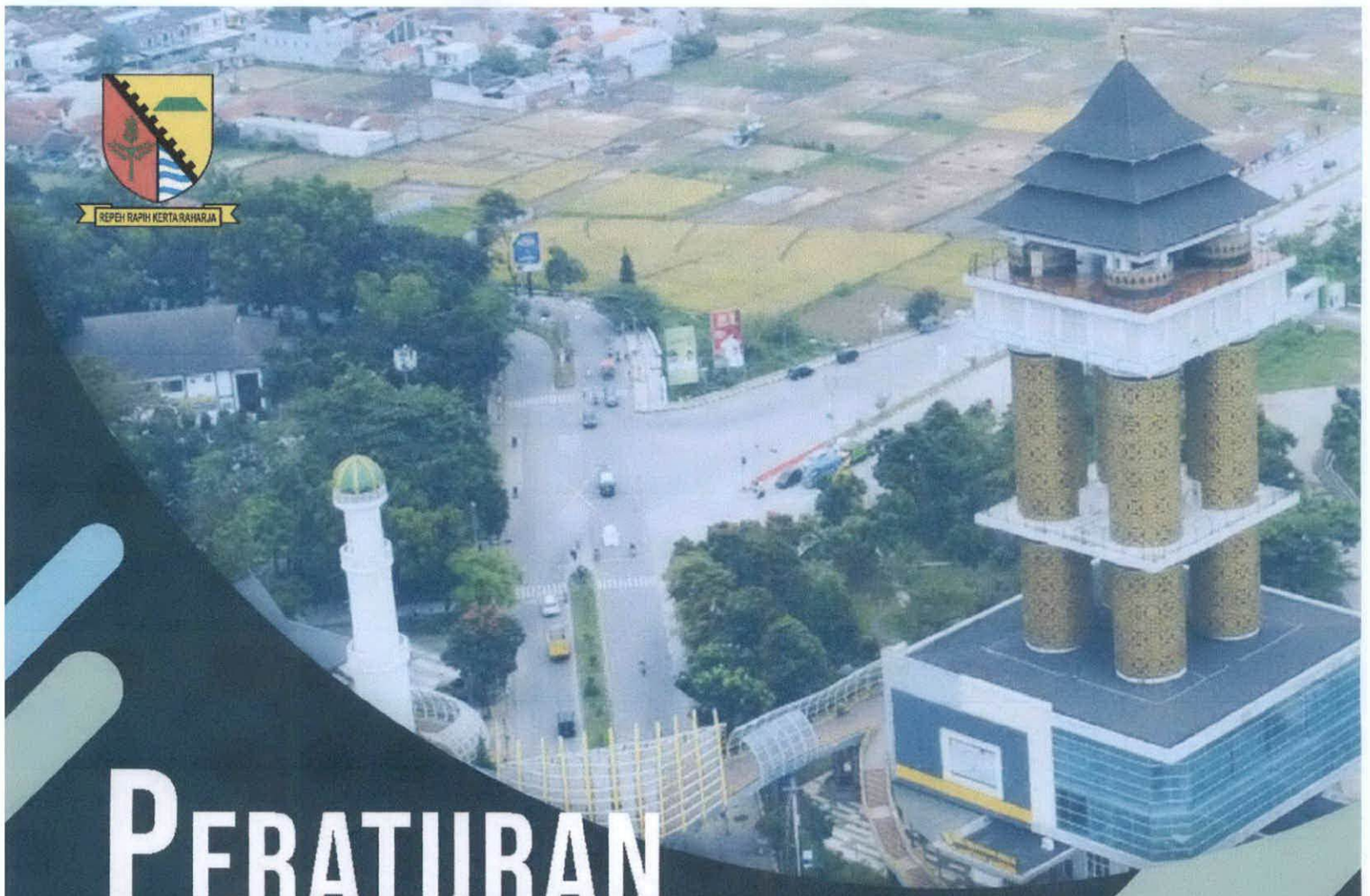
No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra-perangkat daerah.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD.	√			
7	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten.	√			
10a.	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
10c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			

1	2	3	4	5	6
10d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerahtelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan.	√			

Disusun oleh

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. RUKMANA,. MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19650520 199102 1 002



PERATURAN BUPATI BANDUNG

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS KETENAGAKERJAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KETENAGAKERJAAN
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax (022) 5893002Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Email : disnaker@bandungkab.go.id
Website : www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 800/029/Sekre
LAMPIRAN : 2 (DUA)

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DINAS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung.

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92).
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025;
13. Keputusan Bupati Bandung nomor 008.1.1/KEP.131-BAPPERIDA/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 12 Maret 2024

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG,

Drs. H. RUKMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650520 199102 1 002

LAMPIRAN I
NOMOR : 800/029/Sekre
TANGGAL : 12 Maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung
Ketua	:	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung
Sekretaris	:	Fungsional Perencana Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bandung
Anggota	:	1. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja; 2. Kepala Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan IPK; 3. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas; 4. Kepala Bidang Hubungan Industrial 5. Kepala UPTD; 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 7. Kepala Sub Bagian Keuangan

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. RUKMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650520 199102 1 002

LAMPIRAN II
NOMOR : 800/029/Sekre
TANGGAL : 12 Maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG

TUGAS POKOK TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG

I. PENANGGUNG JAWAB
Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Penyusunan Rencana Kerja .

II. KETUA
1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Penyusunan Rencana Kerja .
2. Mengendalikan seluruh kegiatan Penyusunan Rencana Kerja .
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan.

III. SEKRETARIS
1. Membantu ketua mengkoordinasikan seluruh kegiatan Penyusunan Rencana Kerja .
2. Membantu ketua mengendalikan seluruh kegiatan Penyusunan Rencana Kerja .
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja kepada ketua.

V. ANGGOTA
1. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam Penyusunan Rencana Kerja .
2. Memberikan arahan teknis dalam penanganan dan pengendalian dalam Penyusunan Rencana Kerja .

VI. KESEKRETARIATAN
1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan pelaksanaan tugas.
2. Memberikan pelayanan teknis administrasi.
3. Menyelenggarakan rapat-rapat pelaksanaan kebijkan berdasarkan petunjuk Sekretaris.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. RUKMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650520 199102 1 002

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung selama tahun 2025.

Dalam urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Soreang,
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. RUKMANA,. MSi
Pembina Utama Muda
Nip. 19650520 199102 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2.1 Penduduk Usia Kerja 27
2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 27
2.2.3 Angkatan Kerja 28
2.2.4 Penduduk yang Bekerja 28
2.2.5 Penganggur Terbuka 28
2.2.6 Pelatihan Tenaga Kerja 29
2.2.7 Penempatan Tenaga Kerja 30
2.2.8 Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 30
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 31
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD 35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 50
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 52
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 98
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 98
BAB V PENUTUP 119
5.1 Catatan-catatan Penting 119
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 119
5.3 Rencana Tindak Lanjut 120

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra,dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung.

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan memperhatikan dan mensinergikan selain dengan RPJM Kementrian Ketenagakerjaan, RPJM Provinsi Jawa Barat, Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan KeTenaga Kerjaan.

Rencana Kerja perangkat daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung.

Pembangunan daerah adalah pembangunan yang diarahkan untuk memantapkan masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera sebagai titik pusat perhatian dari segenap gerak pembangun, sekaligus sebagai modal dasar dan kekuatan daerah, pembangunan manusia menekankan pada peningkatan harkat, martabat hak dan kewajiban manusia yang tercermin pada peningkatan nilai seperti etika, estetika, logika. Nilai-nilai tersebut adalah beriman, bertaqwa, amanah, sadar akan harga diri, mandiri, cerdas, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.

Program Nasional yang dilaksanakan baik oleh Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Barat dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yaitu ;

Urusan Wajib :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

3. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Urusan Pilihan :

1. Program Pengembangan Transmigrasi Regional

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan;
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
- Peraturan Derah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 04 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92);
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung;
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Peraturan Bupati No 92 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bandung nomor 008.1.1/KEP.131-BAPPERIDA/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah Tersusunya Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025 secara tepat waktu.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun dalam 4 (empat) BAB dengan sistematika :

Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan-catatan penting
5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2023, capaian Rencana Kerja tahun 2023 (tahun n-1) dan capaian target Renstra Dinas Ketenagakerjaan, pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian. Realisasi program/kegiatan tahun 2023 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini

TC.29 Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PD	76,65	Point		73,47	80,35	109,36%	73,97	80,35	104,83%
		Persentase Aset BMD dalam kondisi baik	85	%		85	98,88	116,33%	90	98,88	116,33%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	%		90	90,17	100,19%	85	90,17	100,19%
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100	%	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	5	2	2	100,00%	2	9	90,00%
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen	2	1	1	100,00%	1	4	80,00%
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	2	2	2	100,00%	1	5	100,00%
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	Orang /Bulan	58	56	53	94,64%	58	58	100,00%
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25	Dokumen	10	5	5	100,00%	5	20	80,00%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	2	1	1	100,00%	1	4	80,00%
2.07.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30	Dokumen	7	0	0	#DIV/0!	6	13	43,33%
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Laporan	4	0	0	#DIV/0!	2	6	60,00%
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	%	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah ASN yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan formal	56	Orang	56	56	27	48,21%	56	56	100,00%
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100	%	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	2	1	1	100,00%	1	4	80,00%
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	2	1	1	100,00%	1	4	80,00%
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	2	1	1	100,00%	1	4	80,00%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	2	1	1	100,00%	1	4	80,00%
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen	4	2	2	100,00%	2	8	80,00%
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	2	1	1	100,00%	1	4	80,00%
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	2	1	1	100,00%	1	4	80,00%
2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1		0	#DIV/0!	0	1	100,00%
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik	85	%		85	97,88	115,15%	85	98,88	116,33%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	0	0	0	#DIV/0!	2	2	#DIV/0!
2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Paket	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	2	5	5	100,00%	0	5	250,00%
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100	%	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	24	12	12	100,00%	12	12	100,00%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	24	12	12	100,00%	12	12	100,00%
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik	85	%		85	97,88	115,15%	85	98,88	116,33%
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	1	1	100,00%	0	1	100,00%
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	5	7	7	100,00%	5	7	140,00%
2.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	-	Unit	0		0	#DIV/0!	0	0	#VALUE!

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2	Unit	4	1	0	0,00%	2	4	200,00%
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	1	1	100,00%	1	2	200,00%
2.07.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	85	%	0	100	98,88	98,88%	85	98,88	116,33%
2.07.01.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	0	1	1	100,00%	0	1	#DIV/0!
2.07.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH	100	%		100	100	100,00%	100	100	100,00%
2.07.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Orang /Bulan	12	12	12	100,00%	12	12	100,00%
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD	64	%		61	91,09	149,33%	63	91,09	142,33%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro)	100	%	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Dokumen	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
2.07.02.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	80	Perusahaan	80	5	16	320,00%	70	166	207,50%
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan	44	%		41	52,13	127,15%	42	52,13	118,48%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi	17	%		17	28,41	167,12%	17	28,41	167,12%
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	5760	Orang	4160	1.660	1660	100,00%	1780	7600	131,94%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	70	Lembaga	32	14	14	100,00%	12	58	82,86%
2.07.03.2.01.04	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	120	Orang	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%
2.07.03.2.01.06	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan vokasi dan Produktivitas	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	8	Kesepakatan	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	74	Persen		60	93,61	156,02%	40	93,61	126,50%
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	175	Lembaga	130	35	35	100,00%	60	225	128,57%
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas	100	%		100	100	100,00%	90	100	100,00%
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1	Dokumen	1	1	1	100,00%	1	3	300,00%
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	19	Persen		16	44,24	276,50%	17	44,24	232,84%
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	19	Orang		16	44,24	276,50%	17	44,24	232,84%
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	4600	Orang	3992	900	933	103,67%	900	5825	126,63%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	900	Orang	478	180	80	44,44%	180	738	82,00%
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	50	Orang	20	0	0	#DIV/0!	10	30	60,00%
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	3600	Orang	1280	360	360	100,00%	420	2060	57,22%
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan	100	Persen	100	30	100	333,33%	30	100	100,00%
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4	Dokumen	2	0	0	#DIV/0!	1	3	75,00%
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	15000	Orang	8854	3000	5044	168,13%	3000	16898	112,65%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	650	Orang	1420	130	1004	772,31%	1200	3624	557,54%
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	persentase PMI yang terlayani	100	%	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	125	Orang	50	25	140	560,00%	25	215	172,00%
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	100	Orang	50	0	0	#DIV/0!	20	70	70,00%
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	60	Persen		57	57,81	101,42%	58	57,81	96,35%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB	41	Perusahaan		41	43	104,88%	41,08	43	104,88%
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	250	Perusahaan	204	50	184	368,00%	20	408	163,20%
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25	Perusahaan	15	5	15	300,00%	3	33	132,00%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5	Laporan	2	1	1	100,00%	2	5	100,00%
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi	26	Persen		26	21,88	118,83%	80	21,88	84,15%
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100	Perkara	50	30	35	116,67%	20	105	105,00%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	60	Perkara	20	60	64	106,67%	10	94	156,67%
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	13	Asosiasi dan Serikat Pekerja	13	13	18	138,46%	13	13	100,00%
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%

KODE REKENING	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					K	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	174000	Orang	191.387	174000	191387	109,99%	174000	556774	319,99%
3.32.02	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi	5	Lokasi	0	1	0	0,00%	1	1	20,00%
3.32.02.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Animo transmigrasi	150	Kepala Keluarga	5	30	0	0,00%	30	35	23,33%
3.32.02.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	100	Orang	100	0	0	#DIV/0!	40	140	140,00%
3.32.02.2.01.09	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	100	Lokasi	0	0	0	#DIV/0!	1	1	1,00%
3.32.02.2.01.020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	5	Lokasi	0	0	0	#DIV/0!	1	1	20,00%

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk realisasi kinerja tahun 2023 secara keseluruhan sudah melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal ini juga sudah sesuai dengan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah. Adapun untuk capaian Rencana Stategis sampai dengan Tahun 2024 secara mayoritas sudah memenuhi.

Hasil dari realisasi Tahun 2023 telah menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja Tahun 2024 dan akan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari analisis kinerja yang dilakukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketenagakerjaan memiliki tupoksi terkait urusan ketenagakerjaan yang mengacu pada Misi ke-4 dan ke-5 dimana segala urusan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasoi Angkatan Kerja, Angkatan Kerja, Penduduk Yang Bekerja, Pengangguran Terbuka, Pelatihan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga kerja dan Hubungan Industrial menjadi hal yang dijadikan fokus utama pada Upaya pencapaian misi tersebut. Semua hal tersebut dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran dengan memiliki indikator dalam setiap tujuan dan sasaranya.

Maka analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dapat terlihat seperti yang tersaji pada tabel TC.30 berikut ini :

TC 30 Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Bandung.

No	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2024	2025	2026	2023	2024	2024	2025	
1	Persentase Penduduk Yang Bekerja			91,85%	92,07%	92,29%	92,49%	92,69%	93,02%	-	92,29%	92,49%	
2	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan			3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	7,00%	3,95%	-	5,00%	6,00%	
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan			15%	16%	17%	18%	19%	53,46%	-	17%	18%	
4	Persentase pencari kerja yang Tersertifikasi			3,25%	3,50%	3,75%	4,00%	4,25%	9,06%	-	3,75%	4,00%	
5	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama			56%	57%	58%	59%	60%	56,16%	-	58%	59%	
6	Nilai akuntabilitas instansi			73,47	73,72	73,97	74,22	74,47	74,36	-	73,97	74,22	
7	Nilai IKM			90	90	90	90	90	90,03	-	90	90	
8	2.1.3 Persentase BMD Dalam Kondisi Baik			85%	85%	85%	85%	85%	99,03	-	85%	85%	

Pada setiap indikator tujuan dan sasaran yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan tabel di atas akan diturunkan kedalam program kegiatan dan sub kegiatan yang termuat pada dokumen Rencana Kerja ini dalam rangka mendorong ketercapaian target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Ketenagakerjaan.

2.2.1 Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 Tahun keatas. Fluktuasi PUK ini tergantung pada naik turunnya jumlah penduduk secara keseluruhan sesuai dengan terjadinya perubahan faktor-faktor demografi.

Tabel 2.3
Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan
Kabupaten Bandung Tahun 2015 – 2023

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2015	2017	2018	2021	2023
≤SD	1.012.209	874.601	885.256	997.848	958.226
SMTP	706.637	796.063	774.527	760.876	792.494
SMTA Umum	454.078	529.345	572.262	533.589	562.624
SMTA Kejuruan	177.102	202.534	206.320	251.700	244.530
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	42.270	71.260	75.114	48.965	49.214
UNIVERSITAS	125.443	151.706	166.284	138.807	154.161
JUMLAH	2.517.739	2.625.509	2.679.763	2.731.785	2.761.249

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2015-2023.

2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Bila angka TPAK kecil maka dapat di duga bahwa penduduk usia kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya. Dengan demikian angka TPAK dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi maupun faktor demografis. Beberapa faktor demografis yang dianggap penting pengaruhnya terhadap TPAK adalah jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini karena berhasilnya sistem pendidikan yang diprogramkan pemerintah yaitu pendidikan 9 Tahun wajib belajar bagi anak-anak untuk memasuki dunia pendidikan, sementara dari sisi lainnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap pengurangan atau memperlambat angkatan kerja memasuki dunia kerja. Dengan adanya program wajib belajar tersebut maka pertambahan jumlah angkatan kerja untuk Tahun berikutnya diharapkan akan relatif menurun dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Bandung Tahun 2017 – 2023

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2017	2018	2021	2022	2023
≤SD	60.83	56.36	61,72%	61,83%	64,84%
SMTP	52.49	56.73	58,82%	53,66%	57,40%
SMTA Umum	69.47	65.39	68,70%	66,34%	72,03%
SMTA Kejuruan	72.76	75.04	89,08%	79,29%	81,78%
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	73.77	78.69	72,25%	74,55%	73,72%
UNIVERSITAS	86.72	79.49	82,67%	73,20%	82,45%
JUMLAH	62.81	61.89	66,09%	63,64%	67,10%

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2017-2023

2.2.3 Angkatan Kerja

Tabel 2.5
Angkatan Kerja
Kabupaten Bandung Tahun 2017 – 2023

JENIS KELAMIN	TAHUN				
	2017	2018	2021	2022	2023
Laki-Laki	1.076.305	1.100.696	1.135.074	1.778.105	1.201.220
Perempuan	572.759	557.905	651.088	30.694	677.537
JUMLAH	1.649.064	1.658.601	1.786.162	1.808.799	1.878.757

2.2.4 Penduduk yang Bekerja

Penduduk yang bekerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan.

Tabel 2.6
Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Bandung Tahun 2017 – 2023

JENIS KELAMIN	TAHUN				
	2017	2018	2021	2022	2023
Laki-Laki	1,038,758	977,558	1,074,767	1.655.682	1.116.497
Perempuan	545,633	460,807	613,439	26.828	39.831
JUMLAH	1,584,391	1,438,365	1,688,206	1.682.510	1.756.328

2.2.5 Penganggur Terbuka

Penganggur terbuka, terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Jumlah penganggur terbuka di Kabupaten tahun 2014-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya.

Berkurangnya penganggur terbuka dikarenakan jumlah kesempatan kerja yang semakin banyak baik di sektor formal dan non formal. Selain itu karena program Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten

dalam mengurangi angka pengangguran. Diantaranya adalah program pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan berbasis kewirausahaan, uji kompetensi, pemagangan dan diadakannya bursa tenaga kerja (*job fair*). Hal tersebut tampaknya memberikan pengaruh cukup berarti terhadap turunnya pengangguran.

Tabel 2.7
Penganggur Terbuka
Kabupaten Bandung Tahun 2017 – 2023

JENIS KELAMIN	TAHUN				
	2017	2018	2021	2022	2023
Laki-Laki	37,547	46,724	60,307	122.423	84.723
Perempuan	27,126	36,216	37,649	3.866	37.706
JUMLAH	64,673	82,940	97,956	126.289	122.429

2.2.6 Pelatihan Tenaga Kerja

Kabupaten bandung adalah salah satu wilayah Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki berbagai potensi seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, tekstil dan bahan olahannya, pendidikan dan jasa konstruksi. Dengan potensi yang beragam tersebut, maka diperlukan ketersediaan tenaga kerja terampil untuk menjalankan semua potensi tersebut baik berupa tenaga yang dihasilkan oleh pendidikan menengah dan tinggi dan pekerja yang tidak berpendidikan.

Disamping kebutuhan akan tenaga kerja yang besar di wilayah Kabupaten Bandung dari wilayah ini juga banyak menyediakan tenaga kerja yang bekerja di Luar Negeri. Didasari bahwa, untuk penyediaan tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, pendidikan formal dirasakan belum cukup mampu menyediakan tenaga terampil yang siap pakai. Untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai, diperlukan pendidikan lanjutan setelah pendidikan formal berupa pendidikan non formal.

Kita harus menyadari bahwa dalam menghadapi era globalisasi, untuk dapat menembus pasar global dan persyaratan perdagangan bebas, kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat merupakan persyaratan yang tidak dapat dihindarkan. Untuk itu, penciptaan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dan bersertifikat harus menjadi program utama pemerintah. Bila hal ini diabaikan, maka serbuan tenaga kerja dari luar negeri akan mendominasi tanah air temasuk Kabupaten Bandung.

Dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan daerah perlu adanya pendidikan dan latihan kepada para penganggur agar peserta didik mempunyai keahlian baik pendidikan agar tenaga kerja bisa bekerja mandiri atau berwirausaha ataupun memiliki keahlian atau keterampilan pada sektor formal sesuai dengan pasar kerja sehingga setiap ada lowongan dapat diisi sesuai dengan yang dibutuhkan pasar.

Tabel 2.8
Kapasitas Terpasang, Jumlah Instruktur dan Lulusan Pelatihan
Kabupaten Bandung Tahun 2016-2023

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2021	2023
Jumlah kapasitas terpasang	-	-	-	-	-
Jumlah Instruktur	-	-	1	1	5
Jumlah lulusan pelatihan	1.460	2.080	1.260	1.940	2.200

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung

2.2.7 Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bandung setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal tersebut diantaranya karena program Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam mengurangi angka pengangguran. Diantaranya adalah program pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan berbasis kewirausahaan, uji kompetensi, pemagangan dan diadakannya bursa tenaga kerja (*job fair*).

Tabel 2.9
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan
Kabupaten Bandung Tahun 2016-2023

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2021	2022	2023
Pencari kerja terdaftar	10.742	7.486	5.100	11317	5044
Pencari kerja ditempatkan	7.820	5.390	3.725	2299	3400

2.2.8 Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Perusahaan dan pekerja jamsostek aktif mengalami kenaikan setiap tahun. Perusahaan menyadari pentingnya jaminan sosial tenaga kerja. Target yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya kesejahteraan pekerja. Kondisi hubungan industrial pun akan semakin kondusif. Dengan demikian, para pekerja akan bekerja lebih tenang, nyaman dan meraih kesejahteraan yang dicita-citakan. Bagi pengusaha, kondisi ini akan mendorong usahanya semakin maju berkembang dan produktifitas yang makin tinggi.

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Sejak diluncurkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Upah Minimum Kabupaten Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring dengan kenaikan KHL.

Tabel 2.10
Perkembangan Upah Minimum
Kabupaten Bandung,Tahun 2021-2023

Tahun	UMK (Rp)
2021	3.241.929,67
2022	3.241.929,67
2023	3.492.465,99

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Kinerja pelayanan pada Dinas Ketenagakerjaan meliputi Hubungan Industrial, Pelayanan Antar Kerja dan Pelatihan sejauh ini sudah berada pada level yang tinggi berdasarkan pada penilaian IKM pada tahun 2023 yang ada pada Kriteria Sangat Baik (90,17 Point) hal.

Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 bahwa salah satu isu terkait ketenagakerjaan di kabuoaten bandung bahwa sumber daya manusia belum mampu berdaya saing. Hal ini berdasarkan kepada Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung masih didominasi oleh tatanan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 33,44%. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas hanya sebesar 8,36%. Jika dibandingkan dengan Agustus 2022, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah justru mengalami peningkatan persentase sebesar 2,96 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mengalami penurunan persentase.

Hal kritis pada pelayanan terdapat pada Pelayanan Antar Kerja di Sub Kesempatan Kerja dimana kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang tersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Masih terdapatnya perbedaan antara link and match pada lowongan yang tersedia menyebabkan tingkat kesempatan kerja masih rendah sehingga angka pengangguran masih cukup besar. Oleh sebab itu sinergitas program menjadi hal penting pada penentuan isu-isu penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan.

Bonus demografi menjadi salah satu tantangan dan peluang bagi pelayanan Dinas Ketanagakerjaan, bagaimana upaya Dinas Ketenagakerjaan dalam memanfaat bonus demografi serta dampak apa saja yang terjadi ketika bonus demografi ini tidak terselesaikan dengan baik menjadi fokus Dinas Ketenagakerjaan dalam menyelaraskan program kegiatan yang menjadi prioritas nasional, provinsi dan daerah seperti pada table berikut :

Tabel 2.11
Sinergitas Program
pada Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat**	**RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026**
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas.		Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja mandiri yang berdaya saing dan inovatif	Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan.		Memberikan fasilitasi peningkatan sarana dan prasana pelatihan kerja	Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0
		Memberikan fasilitasi bagi pencari kerja usia muda untuk meningkatkan kemampuan menjadi pekerja mandiri	
		Mengembangkan kemampuan purna tenaga kerja untuk mengembangkan kemampuan sebagai pekerja mandiri	
		Memberikan fasilitasi penempatan kerja (baik di dalam maupun di luar negeri) dan pembinaan purna-kerja Memberikan fasilitasi perluasan kesempatan kerja	
Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan.		Menyelesaikan kasus hubungan industrial secara cepat, tepat dan berkeadilan Meningkatkan peran pekerja dan pengusaha dalam mewujudkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja Memberikan fasilitasi kepada pekerja/buruh dalam rangka mencapai kesejahteraan Peningkatan pemahaman terhadap perundangan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan pekerja	Meningkatkan perlindungan pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
	Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Mendorong penyelenggaraan kerjasama antara daerah pengirim dengan daerah penempatan	
	Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi.	Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi melalui pelatihan yang efektif	

Dalam hal permasalahan dan hambatan yang ada pada dinas ketenagakerjaan diantaranya adalah antara lain:

1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja,
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi,
3. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja,
4. Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai,
5. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Hal tersebut bisa menciptakan Pengangguran di Kabupaten Bandung , pengangguran bisa bersifat sementara, terutama di kalangan yang baru lulus memerlukan waktu sebelum mereka berhasil mendapatkan pekerjaan. Diindikasikan pula bahwa pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik khususnya yang berpendidikan sekolah menengah ke atas cenderung terjadi karena adanya kekurangsesuaian antara isi pendidikan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan di satu pihak, serta kebutuhan keterampilan dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lain pihak. Belum lagi potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15 – 19 tahun.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mengakibatkan rendahnya daya saing dan kekuatan tawar di pasar kerja, terutama bagi angkatan kerja muda. Kualifikasi mereka belum mampu memenuhi tuntutan pasar kerja dan persaingan pasar global yang membutuhkan tenaga kerja profesional berbasis knowledge, skill, attitude (KSA) ditambah keterampilan sosial (social skill).

Sektor tenaga kerja di Indonesia menghadapi tiga permasalahan utama yang dapat mempengaruhi daya saing tenaga kerja. Pertama, persoalan kesempatan kerja yang terbatas. Situasi ini, disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menyerap angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar kerja dan jumlah penganggur riil.Kedua, rendahnya kualitas angkatan kerja. Ketiga, masih tingginya tingkat pengangguran.

Kondisi ini berdampak pada capaian program kegiatan nasional maupun provinsi seperti pada pencapaian SDG's Pilar Ekonomi dan pada 17 TBP khusunya TBP ke delapan . dimana dampak yang terjadi salahsatunya adalah terhadap angka kemiskinan yang sulit ditekan.

Dua aspek penting ketenagakerjaan di Indonesia yakni Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak akan berarti dan menyejahterakan rakyat jika tidak dikelola oleh tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas. Tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri.

Dalam mengatasi persoalan pengangguran, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan kondisi-kondisi dan upaya-upaya seperti :

- Menciptakan lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Tantangan ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan karena terkait iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung, dan harus didukung dengan upaya pengembangan industri yang bersifat padat karya.
- Mendorong perpindahan pekerja dari jenis pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi. Tantangan ini harus diikuti dengan perbaikan kebijakan ketenagakerjaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, perubahan pola hubungan industrial antara pemerintah, pekerja dan pemberi kerja, serta peningkatan pendidikan, keterampilan/keahlian dan kompetensi tenaga kerja.
- Meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih bekerja di lapangan kerja informal. Tantangan ini harus diikuti upaya pemberdayaan UMKM yang banyak menyerap tenaga kerja informal, pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang banyak menyerap tenaga kerja informal, serta reformasi penempatan dan perlindungan TKI terampil maupun non terampil.

Penduduk memiliki 2 (dua) potensi yang kontradiktif. Di satu sisi penduduk dapat menjadi beban bagi proses pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk dapat menjadi modal pembangunan. Penduduk berjumlah besar dengan kualitas rendah lebih merupakan beban bagi pembangunan karena kapasitas produksinya melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, timbul berbagai dampak sosial seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, daerah urban, krisis pangan, daya dukung alam dan tingginya tingkat kriminalitas. Sedangkan di sisi lain masih banyak daerah di luar Jawa yang kekurangan jumlah penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Dengan demikian, program transmigrasi merupakan salah satu alternatif solusi, mengingat program ini pada prinsipnya merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Program transmigrasi sangat bersifat strategis untuk terus dijalankan karena

di samping menjaga keutuhan NKRI, juga terkait kebijakan kependudukan lainnxya berupa kebijakan pengendalian jumlah, kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk, dan pembangunan ekonomi di daerah tujuan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, untuk kelancaran dan keselarasan program transmigrasi, penyusunan program transmigrasi atau mobilitas penduduk perlu didahului dengan kerjasama antara daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan penempatan yang berkesinambungan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 sesuai tabel (Terlampir) sebagai berikut :

TC.31 Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal					**Hasil Analisis Kebutuhan**				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP (Poin)	74,97	17.207.714.877	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP (Poin)	74,97	17.146.667.587
		Nilai IKM (poin)	90				Nilai IKM (poin)	90	
		Persentase aset BMD dalam kondisi baik (%)	85				Persentase aset BMD dalam kondisi baik (%)	85	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (%)	100	67.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (%)	100	67.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	40.000.000

TC.31 Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	2.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	25.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	25.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	13.720.365.877	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	13.277.268.587
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	13.702.865.877	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	13.259.768.587 -
Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)	5	5.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)	5	5.000.000

TC.31 Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	5.000.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	6	2.500.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	6	2.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	2	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	2	5.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	55.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	56	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	56	55.000.000

TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025									
Rancangan Awal					**Hasil Analisis Kebutuhan**				
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan operasional perkantoran (%)	100	374.223.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan operasional perkantoran (%)	100	323.000.000
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1	10.000.000	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1	10.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	130.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	130.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	70.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	80.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	10.000.000

TC.31 Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	13.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	13.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	80.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik (%)	85		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik (%)	85	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan operasional perkantoran (%)	100	2.580.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan operasional perkantoran (%)	100	2.580.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	180.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12	180.000.000

TC.31 Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2.400.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2.400.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik (%)	85	262.349.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik (%)	85	687.349.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	142.349.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	142.349.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	20.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	525.000.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH	100	129.550.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH	100	157.050.000

TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025									
Rancangan Awal					**Hasil Analisis Kebutuhan**				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	129.550.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	157.050.000
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD (%)	63	424.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD (%)	63	424.000.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro)(%)	100	424.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro)(%)	100	424.000.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	124.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	124.000.000
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	40	300.000.000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	40	300.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan (%)	42	2.596.674.700	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan (%)	42	13.438.744.200

TC.31 Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi (%)	17	2.146.674.700	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi (%)	17	12.988.744.200
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	1040	145.802.200	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	1300	8.977.012.900
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	14	1.300.872.500	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	14	3.311.731.300
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	60	200.000.000				60	200.000.000
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	4	500.000.000				4	500.000.000

TC.31 Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina (%)	72	250.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina (%)	72	250.000.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	35	250.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	35	250.000.000
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas (%)	90	200.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas (%)	90	200.000.000
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah(Dokumen)	1	200.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah(Dokumen)	1	200.000.000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	17	2.763.902.812	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	17	7.652.092.887
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	17	2.006.481.812	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	17	6.894.671.887

TC.31 Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	900	1.657.458.200	Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	900	1870097200
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	180	91.524.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	180	91.524.000
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	50	50.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	50	50.000.000
Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	720	207.499.612	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	251	4.883.050.687
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan (%)251	30	673.138.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan (%)	30	673.138.000
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	1	60.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	1	60.000.000

TC.31 Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)(Orang)	3000	60.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)(Orang)	3000	60.000.000
Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	130	553.138.000	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	130	553.138.000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		persentase PMI yang terlayani (%)	100	84.283.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		persentase PMI yang terlayani (%)	100	84.283.000
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	25	39.375.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	25	39.375.000
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	20	44.908.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	20	44.908.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	58	1.943.769.800	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	58	3.410.019.800

TC.31 Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB (%)	41	358.324.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB (%)	41	358.324.000
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	50	141.784.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	50	141.784.000
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	5	66.540.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	5	66.540.000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan(Laporan)	1	150.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan(Laporan)	1	150.000.000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi (%)	26	1.585.445.800	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi (%)	26	3.051.695.800
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	20	73.271.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	20	73.271.000

TC.31 Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025									
Rancangan Awal					**Hasil Analisis Kebutuhan**				
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	60	70.100.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	60	70.100.000
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	13	842.074.800	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	13	2.308.324.800
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	500.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	500.000.000
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	174000	100.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	174000	100.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi (Lokasi)	1	140.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi (Lokasi)	1	140.000.000
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Animo transmigrasi (Kepala Keluarga)	30	140.000.000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Animo transmigrasi (Kepala Keluarga)	30	140.000.000

TC.31 Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Pelatihan Transmigrasi		Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan(Orang)	40	50.000.000	Pelatihan Transmigrasi		Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan(Orang)	40	50.000.000
Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran		Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)	60	40.000.000	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran		Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)	60	40.000.000
Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	1	50.000.000	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	1	50.000.000

Menelaah Tabel TC. 31 bahwa hasil analisis Dinas Ketenagakerjaan melalui tim penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 terkait perbandingan Target Kinerja dan Anggaran pada Ranwal Renja Tahun 2025 mengalami kenaikan dikarenakan adanya beberapa sub kegiatan yang menjadi program kewilayahan dan menindaklanjuti hasil rapat internal dalam rangka pencapaian IKK dan IKD Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam mendukung program/kegiatan usulan masyarakat telah melaksanakan kegiatan berbasis kewilayahan. Proses ini diawali dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang menampung aspirasi masyarakat melalui DSP Kecamatan untuk selanjutnya ditajamkan Kembali dengan disesuaikan dengan prioritas dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan melalui kegiatan Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dibawa ke Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan hasil yang tertera pada table TC.32 berikut:

TC.32 Tabel 2.13
Usulan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Disnaker Kab. Bandung.

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		**Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan**		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		**Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi**		
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Wilayah Kabupaten Bandung	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1300 Orang	Hasil usulan masyarakat dan Pokir DPRD
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Wilayah Kabupaten Bandung	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	166 Orang	Hasil usulan masyarakat dan Pokir DPRD
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**		
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan**		
	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Wilayah Kabupaten Bandung	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	171 Orang	Hasil usulan masyarakat dan Pokir DPRD

Tabel hasil usulan kewilayahan yang disusulkan ke Dinas Ketenagakerjaan di atas, telah sesusai dengan tupoksi Dinas Ketenagakerjaan serta sudah diselaraskan dengan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Ketenagakerjaan pada Tahun 2025.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan daerah merupakan proses di mana pemerintah daerah maupun masyarakatnya secara bersama-sama mengelola sumber daya-sumber daya yang ada. Pemerintah daerah dengan sektor swasta membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di dalam wilayah tersebut. Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya, jadi bukan hanya sebagai usaha pemerintah semata. Pembangunan memiliki berbagai tujuan, antara lain untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah serta antar warga masyarakat demi pemerataan dan keadilan. Pembangunan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, serta menciptakan atau menambah lapangan kerja. Pembangunan juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, serta mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). Pembangunan daerah merupakan bagian internal dan integral dari pembangunan nasional. Namun pencapaian keberhasilan pembangunan daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Perbedaan kondisi daerah akan mengakibatkan perbedaan dalam menerapkan corak pembangunan. Dengan demikian, pencapaian sasaran pembangunan di daerah disesuaikan dengan potensi setempat, aspirasi masyarakat, juga permasalahan pembangunan di daerah.

Indonesia tengah menghadapi tantangan untuk memasuki siklus "bonus demografi", yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi nasional. Bonus demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja sehingga lebih berkesempatan untuk meningkatkan tabungan keluarga. Dengan demikian, pada periode 2025 - 2035, Indonesia memiliki kesempatan besar memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi akan menjadi *windows of opportunity* bila disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa di masa depan. Sebaliknya, bonus demografi bisa menjadi *windows of disaster* jika ternyata sebagian besar penduduk usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus pendidikan

SMP atau SMA, lalu penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, sehingga menimbulkan efek sosial yang buruk dan hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan. Untuk meraih keuntungan bonus demografi, ada 4 (empat) hal yang harus dipenuhi : (1) penduduk usia muda yang meledak jumlahnya itu harus mempunyai pekerjaan produktif dan bisa menabung, (2) tabungan rumah tangga dapat diinvestasikan untuk menciptakan lapangan kerja produktif, (3) ada investasi untuk meningkatkan modal manusia agar dapat memanfaatkan momentum jendela peluang (*windows of opportunity*) yang akan datang, dan (4) menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan masuk pasar kerja.

Visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur" selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 sejalan dengan visi Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi. Kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh gerak dunia usaha yang menciptakan lapangan kerja dan pendapatan.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berlandaskan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Sejalan dengan itu perlu adanya upaya:

- Perbaikan produktivitas nasional melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan pertumbuhan ekonomi;
- Penciptaan lapangan kerja formal yang melindungi pekerja Indonesia serta dilaksanakan berbasiskan hubungan industrial yang setara antara pekerja dan pengusaha;
- Perlindungan pekerja Indonesia, sebagai bagian dari perlindungan sosial, diberikan tidak hanya bagi pekerja formal namun juga pekerja informal;
- Perbaikan regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung dunia usaha.

Penanggulangan kemiskinan adalah upaya terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang mana masing-masing memiliki peran tersendiri, yaitu :

- Peran masyarakat dan dunia usaha diarahkan dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah menyelesaikan masalah kemiskinan yang riil terjadi di suatu daerah;
- Dunia usaha membantu penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada daerah tertentu melalui pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR);
- Pemerintah Pusat mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, masyarakat dan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Kabupaten Bandung yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Kabupaten Bandung Tahun 2021– 2026 yaitu : *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera"*. Peningkatan

ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar.

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. Pada tahun 2024 mendatang Dinas Ketenagakerjaan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana tersebut di atas. Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Dinas Ketenagakerjaan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan dan produktifitas Tenaga Kerja
2. Mengembangkan Sistem Informasi Pasar Kerja
3. Meningkatkan ketenangan kerja bagi pekerja dan kemajuan berusaha bagi pengusaha
4. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja Dengan Peningkatan Keselamatan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Pekerja
5. Meningkatkan Pelayanan Ketransmigrasian dengan Mensinergikan Penempatan Tenaga Kerja Pada Lokasi-lokasi Transmigrasi.

Sasaran dari organisasi yaitu merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan stratejik organisasi. Sasaran-sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung sasaran dengan kebijakan pelaksanaanya sebagai berikut :

- Menciptakan Tenaga Kerja yang maju, mandiri, dan berdaya saing dengan berorientasi pada perluasan kerja dan kemandirian yaitu menciptakan dan mempersiapkan tenaga kerja dalam hal ini pencari kerja yang memiliki keterampilan yang dapat bersaing dalam pasar kerja serta dipersiapkan untuk menjadi pencipta lapangan kerja.
- Mewujudkan hubungan kerja yang harmonis yaitu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menunjang antara pengusaha dan pekerja dengan meletakan keseimbangan hak dan kewajiban yang dilandasi dengan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), transparansi, komunikatif dan saling membuka peluang untuk mengembangkan pendidikan dan latihan serta mengembangkan sistem profesionalisasi setiap perkerja melalui kesempatan promosi pada jabatan-jabatan yang lebih baik secara berjenjang.

Selanjutnya, berdasarkan analisis lingkungan strategis ditentukan kebijakan pelaksanaanya :

1. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas pencari kerja dalam mengurangi tingkat pengangguran yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan strategis, dalam kenyataan bahwa tingkat keterampilan dan keahlian para pencari kerja di Kabupaten Bandung ini masih relatif kurang, hal ini dibuktikan dalam perebutan peluang pasar kerja di sektor formal sedikit sekali yang terserap, oleh karena demikian kebijakan penempatan tersebut tidak hanya disektor formal saja tapi harus diimbangi melalui penempatan sektor formal dan pembentukan usaha mandiri, untuk menjangkau kondisi yang demikian tersebut diawali dengan pemberian pelatihan-pelatihan terhadap penguasan salah satu penerapan teknologi.
2. Meningkatkan Pendayagunaan dan Penyebaran Tenaga Kerja
   Strategi untuk pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja berkaitan erat dengan percepatan serta pemerataan pembangunan, selaras dengan fungsi tata ruang, untuk hal tersebut perlu didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang *matching* baik dari segi kualitas dan kuantitas sehingga akan terhindar atau paling dapat dibatasi penumpukan tenaga kerja di satu tempat, sementara di tempat lain kekurangan tenaga kerja. Kondisi yang sudah dirasakan adanya kekurangan tenaga kerja terdapat pada wilayah-wilayah untuk bidang pertanian.

3. Meningkatkan Ketenangan dan Kemajuan Berusaha
   Sebagai pelaku ekonomi perusahaan swasta memiliki konstribusi yang sangat penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu ketenangan dalam berusaha bagi pengusaha dan ketenangan bekerja bagi pekerja mutlak dibutuhkan untuk itu perlu diambil strategi kebijakan melalui perwujudan hubungan kerja yang serasi, harmonis dan dinamis. Untuk mencapai itu semua yang harus ditempuh adalah melaksanakan secara bersungguh-sungguh semua hak dan kewajiban masing-masing antar pekerja dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sosialisasi bimbingan teknis.
4. Meningkatkan pelayanan ketransmigrasian dengan mensinergikan Penempatan Tenaga Kerja pada lokasi-lokasi Transmigrasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 dapat disajikan pada table berikut ini :

Tabel 3.14
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETENAGAKERJAAN

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya persentase capaian proyeksi indikator terhadap RTKD	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD			
2	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dokumen Rencana Tenaga Kerja	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro)		
3	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Tersedianya Dokumen RTK Makro secara tepat waktu	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	
4	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	
5	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Persentase Penempatan Pencari Kerja terdaftar	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan			
6	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Jumlah Penempatan Pencari Kerja terdaftar	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan		
7	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penempatan pencari kerja melalui layanan AKAD dan AKL	Pelayanan antar Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
8	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Pencari Kerja yang mendapatkan penyukuhan dan Bimbingan Jabatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	
9	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Terlayaninya Tenaga Kerja Disabilitas di Kabupaten Bandung	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	
10	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Optimalisasi Kinerja Kelompok Kerja melalui pelatihan TKM	Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	
11	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Optimalisasi kinerja pelayanan kepada pencari kerja	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan		
12	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Tersusunya Dokumen Database Ketenagakerjaan	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
13	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Terdatanya jumlah pencari kerja yang mendaftar	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
14	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Terlaksananya kegiatan jobfair/bursa kerja	Job Fair/Bursa Kerja			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	
15	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Perlindungan terhadap PMI dan Purna PMI di Kabupaten Bandung	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**		persentase PMI yang terlayani		
16	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Terlaksananya pelayanan terhadap CPMI dan PMI bermasalah	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	
17	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pemberdayaan PMI	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	
18	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Terlaksananya penjajagan lokasi transmigrasi	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi			
19	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya jumlah Kuota transmigran	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Animo transmigrasi		
20	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Optimalisasi kegiatan pelatihan terhadap transmigran	Pelatihan Transmigrasi			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang medapat pelatihan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
21	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Terdapatnya calon lokasi transmigran yang layak	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran			Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	
22	Meningkatkan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Berkurangnya jumlah transmigran yang kembali ke daerah asal	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	
23	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten	Meningkatnya Lulusan Pelatihan bagi Penari Kerja yang mendapat pekerjaan	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan			
24	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten	Meningkatnya kualitas pencari kerja melalui Uji kompetensi dan sertifikasi	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi		
25	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	
26	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terlaksananya Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
27	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Bandung	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		
28	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten	Optimalisasi LPK swasta di Kab. Bandung	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	
29	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten	Meningkatnya Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan Produktivitas	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas		
30	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Kompeten	Tersusunnya Kualitas dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja daerah	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	
31	Meningkatkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Meningkatnya kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama			
32	Meningkatkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Meningkatnya tata Kelola persyaratan kerja	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
33	Meningkatkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	
34	Meningkatkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Tersedianya data perusahaan yang menyusun PKB	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	
35	Meningkatkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Meningkatnya jumlah perusahaan dengan tata kelola yang layak	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	
36	Meningkatkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Optimalisasi mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
37	Meningkatkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perselisihan	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	
38	Meningkatkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Meningkatnya penyelesaian perkara dalam Hubungan Industrial	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	
39	Meningkatkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Tersusunya data asosiasi serikat pekerja yang sesuai prosedur	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	
40	Meningkatkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas LKS Tripartit	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	
41	Meningkatkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Teknis			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
42	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP			
43	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas dokumen perencanaan yang tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu		
44	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan secara tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
45	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersusunya Dokumen Laporan Kinerja yang baik secara tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
46	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi yang baik secara tepat waktu	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
47	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen keuangan yang diselesaikan tepat waktu		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
48	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tercapainya layanan yang optimal terhadap ASN Dinas Ketenagakerjaan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
49	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan secara tepat waktu	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
50	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun secara tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
51	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya secara tepat waktu	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
52	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tercapainya Target Realisasi Keuangan dalam Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
53	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Optimalisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
54	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersedianya Laporan Penatausahaan BMD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
55	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu		
56	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya Kinerja SDM Internal	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
57	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan operasional perkantoran		
58	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersedianya Laporan Penatausahaan BMD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
59	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Ketenagakerjaan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
60	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersedianya Logistik yang memadai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	
61	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersedianya Barang Cetakan yang memadai	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
62	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersedianya Bahan Bacaan pada Dinas Ketenagakerjaan dalam Satu Tahun	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
63	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
64	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
65	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Optimalisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
66	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersedianya Peralatan dan mesin yang memadai	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
67	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya Pelayanan Internal Organisasi	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan operasional perkantoran		
68	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersedianya sarana jasa komunikasi dan listrik pada Dinas Ketenagakerjaan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
69	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tersedianya layanan jasa kebersihan dan keamanan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
70	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Optimalisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
72	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
73	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Terlaksananya pemeliharaan sarana peralatan dan mesin	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
74	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Terlaksananya pemeliharaan sarana peralatan dan mesin	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
75	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH		
76	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Tercapainya layanan yang optimal terhadap ASN Dinas Ketenagakerjaan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang klasisikafi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Program dan Kegiatan setiap perangkat daerah harus mengacu pada peraturan tersebut, sehingga setiap perangkat daerah diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Strategisnya, begitu juga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2023 dalam menyusun rencana program dan kegiatannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut. Program dan Kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RTK)

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Kegiatan	Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD	63 %
2	Masukan	Dana yang Dibutuhkan	Rp.424,000,000,-
3	Keluaran	Persentase program/kegiatan yang berdasarkan RTK	100%
4	Hasil	Persentase program/kegiatan yang berdasarkan RTK	100%

Terbagi atas Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Indikator	Target Kinerja
1	Penyusunan Tenaga Kerja Makro	Rp. 124.000.000,-	Jumlah Dokumen RTK Makro yang dievaluasi	1 Dokumen
2	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Rp 300.000.000,-	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	70 Orang

II. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.

1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Kegiatan	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan	42 %
2	Masukan	Dana yang Dibutuhkan	Rp. 12.988.744.200
3	Keluaran	Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi	17 Persen

4	Hasil	Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi	17 Persen

Terbagi atas Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Indikator	Target Kinerja
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 8.977.012.900	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1300 Orang
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 3.311.731.300	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	16 Kesepakatan
3	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 200.000.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 Orang
4	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Rp. 500.000.000	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	4 Kesepakatan

2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Kegiatan	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan	42 %
2	Masukan	Dana yang Dibutuhkan	Rp. 250,000,000,-
3	Keluaran	persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	72 %
4	Hasil	persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	72 %

Terbagi atas Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Indikator	Target Kinerja
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 250.000.000,-	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	35 Lembaga

3. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Kegiatan	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan	42 %
2	Masukan	Dana yang Dibutuhkan	Rp. 200.000.000,-
3	Keluaran	Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas	100 Persen
4	Hasil	Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas	100 Persen

Terbagi atas Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Indikator	Target Kinerja
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 200.000.000,-	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen

III. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/kota.

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Kegiatan	Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	17 %
2	Masukan	Dana yang Dibutuhkan	Rp. 6.894.671.887
3	Keluaran	Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	17 %
4	Hasil	Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	17 %

Terbagi atas Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Indikator	Target Kinerja
1	Pelayanan antar Kerja	Rp. 1.870.097.200	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	900 Orang
2	Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp. 91.524.000	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	180 Orang
3	Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 4.883.050.687	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	251 Orang
4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Rp. 50.000.000	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	10 Orang

2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Kegiatan	Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	17 %
2	Masukan	Dana yang Dibutuhkan	Rp. 673,138,000,-
3	Keluaran	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan	30 Persen
4	Hasil	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan	30 Persen

Terbagi atas Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Indikator	Target Kinerja
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 60.000.000,-	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3000 Orang
2	Job Fair/Bursa Kerja	Rp. 553.138.400,-	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	500 Orang
3	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 60.000.000	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen

3. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Kegiatan	Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	17 %
2	Masukan	Dana yang Dibutuhkan	Rp. 84,283,000,-
3	Keluaran	Persentase PMI yang Terlayani	100 %
4	Hasil	Persentase PMI yang Terlayani	100 %

Terbagi atas Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Indikator	Target Kinerja
1	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Rp. 39,375,000,-	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	25 Orang
2	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Rp. 44.908.000,-	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang

IV. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL.

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Kegiatan	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	58 %
2	Masukan	Dana yang Dibutuhkan	Rp. 358.324.000
3	Keluaran	Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB	41 Persen
4	Hasil	Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB	41 Persen

Terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Indikator	Target Kinerja
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp. 141.784.000,-	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan
2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Rp. 66.540.000,-	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan
3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi SaranaHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Rp. 150,000,000,-	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan

2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Kegiatan	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	58 %
2	Masukan	Dana yang Dibutuhkan	Rp. 3.051.695.800
3	Keluaran	Porsentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi	26 %
4	Hasil	Porsentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi	26 %

Terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Indikator	Target Kinerja
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 73.271.000,-	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 70.100.000,-	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	60 Perkara
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Rp. 2.308.324.800	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	13 Asosiasi dan Serikat Pekerja
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 500,000,000,-	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp. 150.000.000	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	174000 orang

V. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Kegiatan	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi	1 Lokasi
2	Masukan	Dana yang Dibutuhkan	Rp. 140.000.000
3	Keluaran	Jumlah Animo transmigrasi	30 KK
4	Hasil	Jumlah Animo transmigrasi	30 KK

Terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Indikator	Target Kinerja
1	Pelatihan Transmigrasi	Rp. 50.000.000,-	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang medapat pelatihan	40 Orang
2	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Rp. 50.000.000,-	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	60 Lokasi
3	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Rp. 40.000.000,-	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi

TC.33

Tabel 4.15

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung Dinas Ketenagakerjaan.

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DINAS KETENAGAKERJAAN				42.211.524.474				25.076.062.189
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				42.071.524.474				24.936.062.189
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				42.071.524.474				24.936.062.189
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Nilai IKM Persentase BMD dalam Kondisi Baik		76.45 poin 90 poin 85 persen Poin	17.146.667.587			76.45 poin 90 poin 85 persen Poin	17.207.714.877
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu		100 Persen	67.000.000			76.65Point 0Poin	67.000.000
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	40.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	2.000.000
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	25.000.000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu		100 Persen	13.277.268.587			100% 100Persen	13.720.365.877
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58 Orang/bulan	13.259.768.587	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		58 Orang/bulan	13.702.865.877

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	5.000.000
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000
2	07	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	2.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	2.500.000
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	5.000.000
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		95 Persen	0			95Persen	0
2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Laporan	0
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu		100 Persen	55.000.000			100%	55.000.000
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Paket	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		58 Paket	30.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Orang	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		56 Orang	25.000.000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran		100 Persen	323.000.000			100%	323.000.000
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	10.000.000
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	130.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	130.000.000
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	10.000.000
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	70.000.000
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	10.000.000
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	13.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	13.000.000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	80.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	80.000.000
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Dokumen	0
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	0			0%	0
2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			0
2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			0
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	0
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran		100 Persen	2.580.000.000			100%	2.580.000.000
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			0
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	180.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	180.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	2.400.000.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		95 persen	687.349.000			95%	262.349.000
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	0
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	142.349.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	142.349.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			0
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	20.000.000
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	525.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	100.000.000
2	07	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH		100 Persen	157.050.000			100persen	200.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/Bulan	157.050.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Orang/Bulan	200.000.000
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD		63 %	424.000.000			63 %	424.000.000
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro)		100 persen	424.000.000			100persen 0%	424.000.000
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro								
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	124.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	124.000.000
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro								
						Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40 Orang	300.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan		43 %	13.438.744.200			43 %	2.596.674.700
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi		17 Persen	12.988.744.200			0Orang 17Persen	2.146.674.700
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1440 Orang	8.977.012.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1060 Orang	145.802.200
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja								
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Lembaga	3.311.731.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14 Lembaga	1.300.872.500

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Produktivitas pada Tahun n							
2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi								
						Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Orang	200.000.000
2	07	03	2.01	0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas								
						Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kesepakatan	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Kesepakatan	500.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		17 Persen 73 Persen	250.000.000			74%	250.000.000
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Lembaga	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35 Lembaga	250.000.000
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas		100 Persen	200.000.000			0Orang 100Persen	200.000.000
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	200.000.000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		18 %	7.652.092.887			18 %	2.763.902.812
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan		18 Persen	6.894.671.887			0orang 19Persen	2.006.481.812
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900 Orang	1.870.097.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		900 Orang	1.657.458.200
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja								
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 Orang	91.524.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		180 Orang	91.524.000
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan								
						Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	50.000.000
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja								
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560 Orang	4.883.050.687	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		400 Orang	207.499.612
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan		30 Persen	673.138.000			30 Persen	673.138.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online								
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	60.000.000
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online								
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3000 Orang	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3000 Orang	60.000.000
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja								
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130 Orang	553.138.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		130 Orang	553.138.000
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	persentase PMI yang terlayani		100 Persen	84.283.000			100%	84.283.000
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	39.375.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Orang	39.375.000
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan								
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	44.908.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang	44.908.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama		59 %	3.410.019.800			59 %	1.943.769.800
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB		41 Persen	358.324.000			41 Persen	358.324.000
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan								
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Perusahaan	141.784.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Perusahaan	141.784.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan								
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Perusahaan	66.540.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Perusahaan	66.540.000
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan								
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	150.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi		26 Persen	3.051.695.800			26%	1.585.445.800
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Perkara	73.271.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Perkara	73.271.000
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Perkara	70.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Perkara	70.100.000
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi								
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2.308.324.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Asosiasi dan Serikat Pekerja	842.074.800

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Lembaga	500.000.000
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja								
						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174000 Orang	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		174000 Orang	100.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				140.000.000				140.000.000
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				140.000.000				140.000.000
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi		1 lokasi	140.000.000			1 lokasi	140.000.000
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Animo transmigrasi		30 Kepala Keluarga	140.000.000			30 Kepala Keluarga	140.000.000
3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Kepala Keluarga	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Kepala Keluarga	50.000.000
3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi								
						Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Orang	0
3	32	03	2.01	0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi								
						Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Kepala Keluarga	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Kepala Keluarga	0
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lokasi	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Lokasi	50.000.000
3	32	03	2.01	0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal								
						Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Orang	0
3	32	03	2.01	0014	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota								
						Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 KK	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 KK	0
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi								
						Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 KK	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 KK	0
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lokasi	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Lokasi	40.000.000
JUMLAH					**42.211.524.474**				**25.076.062.189**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif,yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pemmbangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel Berikut :

Tabel 4.15
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KETENAGAKERJAAN				42.211.524.474		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				42.071.524.474		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				42.071.524.474		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Nilai IKM Persentase BMD dalam Kondisi Baik		76.45 poin 90 poin 85 persen Poin	17.146.667.587		
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu		100 Persen	67.000.000		
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu		100 Persen	13.277.268.587		
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58 Orang/bulan	13.259.768.587	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	2.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		95 Persen	0		
2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu		100 Persen	55.000.000		
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Paket	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Orang	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran		100 Persen	323.000.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	130.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	13.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	80.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	0		
2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran		100 Persen	2.580.000.000		
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	180.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		95 persen	687.349.000		
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	142.349.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	525.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	07	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH		100 Persen	157.050.000		
2	07	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/Bulan	157.050.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD		63 %	424.000.000		
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro)		100 persen	424.000.000		
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	124.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						
						Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan		43 %	13.438.744.200		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi		17 Persen	12.988.744.200		
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1440 Orang	8.977.012.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Lembaga	3.311.731.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	03	2.01	0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas						
						Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kesepakatan	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		17 Persen 73 Persen	250.000.000		
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Lembaga	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas		100 Persen	200.000.000		
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		18 %	7.652.092.887		
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan		18 Persen	6.894.671.887		
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja						
						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900 Orang	1.870.097.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 Orang	91.524.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja						
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560 Orang	4.883.050.687	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan		30 Persen	673.138.000		
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online						
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3000 Orang	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130 Orang	553.138.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	persentase PMI yang terlayani		100 Persen	84.283.000		
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran						
						Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	39.375.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan						
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	44.908.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama		59 %	3.410.019.800		
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB		41 Persen	358.324.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Perusahaan	141.784.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan						
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Perusahaan	66.540.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi		26 Persen	3.051.695.800		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Perkara	73.271.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Perkara	70.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2.308.324.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174000 Orang	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				140.000.000		
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				140.000.000		
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi		1 lokasi	140.000.000		
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Animo transmigrasi		30 Kepala Keluarga	140.000.000		
3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Kepala Keluarga	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi						
						Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	32	03	2.01	0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi						
						Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Kepala Keluarga	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran						
						Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lokasi	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	32	03	2.01	0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	32	03	2.01	0014	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota						
						Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 KK	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi						
						Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 KK	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi						
						Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lokasi	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
JUMLAH									**42.211.524.474**		

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan-catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 terbagi pada 6 Program 18 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan jumlah dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Tahun 2025 secara keseluruhan jumlah anggaran belanja langsung wajib dan belanja perangkat daerah sebesar Rp. 42.211.524.474.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program kegiatan pembangunan didalam Rencana Kerja DISNAKER Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Tahun 2025, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja DISNAKER Kabupaten Bandung Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Rencana Kerja DISNAKER Kabupaten Bandung Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja masih belum sepaham, selanjutnya perlu peningkatan kapasitas dan kinerja SDM baik melalui bimbingan teknis, seminar/workshop, diklat dan sebutan lainnya guna menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Rencana Kerja DISNAKER Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Perangkat Daerah).

6. Rencana Kerja DISNAKER Kabupaten Bandung Tahun 2025 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan
pembangunan.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
3. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
4. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
7. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG

ttd

RUKMANA

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA